

## Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kredit Berskala Mikro Studi Kasus Keberdayaan Kube di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

### *Community Empowerment Model through Micro Scale Credit An Empowerment Case Study in Pandeglang Regency Banten Province*

Tri Gutomo<sup>1</sup> dan Suyanto<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp 0274 377265 . E-mail <trigutomo@yahoo.com.>

<sup>2)</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Jalan Dewi Sartika No 200 Cawang 3 Jakarta Timur. E-mail suyantoslut@yahoo.com.

Diterima 10 Juni 2013, direvisi 11 April 2014, disetujui 22 Mei 2014.

#### Abstract

*This research is done to know community empowerment process, supporting and handicap factors, a micro scale credit on enhancing community welfare, done by Micro Finance Institution (LKM) Baitul Mal Wa'tamil. The research location is determined purposively, in Sukajaya Village, Cadasari Underdistrict, Pandeglang Regency. The research type is qualitative-descriptive with participative approach. Research subjects are LKM care takers and beneficiaries, an escort, four advisors from related institution, and group coordinator. Data are gathered through interview, observation, focus group discussion, and documentary analysis techniques, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finding shows that community empowerment is implemented on the right target, through preparation and implementation as agreed. Community empowerment of the beneficiaries seen in the increment of income through business group (Kube) and productive-economy activities (UEP). The supporting factor are the spirit, discipline, and motivation of the beneficiaries to enhance family economy. The handicap factor is there has not been yet a venture with finance institution, sort of banking in capitalization. It is recommended that the Ministry of Social Affairs, through General Directory of Social Assistance, implement empowerment program for micro scale business and revitalize local non-government organization (LSM) as an escort and a spear tip of poverty solution.*

#### Keywords:

**Community Empowerment-Micro Scale Credit**

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat kredit berskala mikro dalam menyejahterakan masyarakat yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Baitul Mal Wa'tamil (BMT). Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Subjek yang diteliti adalah pengurus LKM dan penerima manfaat, pendamping satu orang, pembina dari instansi terkait empat orang dan koordinator kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen, sedangkan teknik analisis data digunakan deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung tepat sasaran, melalui tahap persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan yang telah disepakati. Keberdayaan masyarakat penerima manfaat program terlihat dari adanya peningkatan penghasilan melalui kegiatan usaha bersama [Kube] dan kegiatan usaha ekonomi produktif [UEP]. Faktor pendukung adanya semangat disiplin dan motivasi penerima manfaat untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Faktor penghambat belum ada kerja sama dengan lembaga keuangan, seperti perbankan tentang sosialisasi masalah permodalan. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktur Jenderal Bantuan sosial agar mengimplementasi program pemberdayaan pada kelompok usaha berskala mikro dan memanfaatkan LSM yang ada di daerah sebagai pendamping sekaligus menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan.

#### Kata Kunci:

**Pemberdayaan Masyarakat-Kredit Skala Mikro**

#### A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sasaran utamanya pengentasan kemiskinan. Kenyataan orang-orang miskin apabila ingin ke-

luar dari lingkaran kemiskinan pasti memerlukan permodalan, tetapi untuk memperoleh permodalan mereka justru lari ke rentenir (meminjam uang ke perorangan dengan bunga tinggi). Kondisi tersebut menyebabkan golongan ekonomi lemah berada pada posisi yang semakin terpuruk di lembah kemiskinan. Golongan ekonomi lemah adalah orang yang tidak memiliki modal dalam bentuk materi, tetapi mereka mempunyai modal motivasi, tenaga, dan semangat untuk berusaha dan bekerja serta mereka mempunyai harapan hidup lebih baik. Masalah yang serba kekurangan sebenarnya dapat diatasi melalui pendekatan program pengembangan diri, yaitu mengembangkan potensi, keyakinan dan kemampuan mereka untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai.

Jumlah penduduk miskin menurut BPS periode 2005 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dari 35,10 juta (15,97 persen) pada tahun 2005 menjadi 30,02 juta (12,49 persen). Penduduk miskin masih relatif banyak, walaupun dilihat dari data statistik dari tahun 2006 hingga tahun 2011 mengalami penurunan. Berdasarkan UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah menjalankan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, kemudian mencanangkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kube dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK).

Pendekatan Kube merupakan pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan program penanganan fakir miskin yang meliputi 15 program. Sejak Kube dicanangkan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, program Kube perlu dievaluasi sehingga efektifitas dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Kube dapat diketahui, termasuk peran Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam Program Pemberdayaan Keluarga Ekonomi Lemah melalui pendekatan Kredit Berskala Mikro. Pertanyaan

penelitian adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan keluarga, sejauhmana keberdayaan masyarakat, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lkilometer Baitul Mal Wa'tamil (BMT)? Tujuan penelitian adalah mengetahui proses perberdayaan masyarakat, tingkat keberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lkilometer Baitul Mal Wa'tamil (BMT). Hasil kajian diharapkan dapat memberi sumbang saran bagi unit terkait di lingkungan Kementerian Sosial dalam upaya pengembangan model pemberdayaan keluarga melalui pembentukan Kube.

## B. Kajian Teori

Kementerian Sosial dalam memasuki milenium ketiga mulai mengurangi pendekatan residual dan lebih menekankan pada pendekatan universal. Dengan visi ini, program pemberdayaan melalui pendekatan kelompok lebih mendapat perhatian. Konsep pendekatan *people centered development* (PCD) adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang menjadi sasaran pelayanan kesejahteraan sosial. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 25/HUK/2003, mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada pemikiran Nurani S (2010), metode adalah cara yang dianjurkan untuk melaksanakan prosedur, sedangkan teknik diartikan sebagai perangkat tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pandangan Koentjaraningrat (2010), di dalam metode selalu melekat teknik yang berupa alat atau seni dan penggunaan alat-alat itu. Teknik sifatnya lebih operasional daripada metode. FX Soerjadi (1982) menyebutkan, bahwa metode adalah suatu cara pelaksanaan kerja seefisien mungkin atau suatu tugas dengan mengingat segi tujuan, tenaga kerja, biaya, fasilitas peralatan, waktu, ruang.

Pemberdayaan memiliki pandangan bahwa demokrasi ekonomi secara harfiah berarti

kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rumusan UUD 1945: "Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, kemakmuran yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang" kemajuan yang ingin diupayakan melalui pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, harus meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial, atau kemakmuran bagi semua orang. Pemberdayaan menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, sosial, dan budaya.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti biaya, prasarana dan sarana yang dialokasikan pada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati rakyat, proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara ilmiah, yang menghasilkan harus menikmati, dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan.

Pengertian pemupukan modal menurut Ginanjar Kartasasmito (1996), bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip, yakni mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola; dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk me-

ngelola kegiatan secara ekonomis; hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat; pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Menurut Sumodiningrat (2007), setiap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan pihak yang peduli pada masyarakat, pemberdayaan harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Berbagai pemberdayaan harus memuat lima hal pokok yakni: Bantuan dana sebagai modal usaha; Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; Pelatihan bagi aparat dan masyarakat; dan Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Kerangka pikir pemberdayaan dapat dilihat dari pengembangan ekonomi rakyat yang berarti upaya untuk melindungi serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang tertinggal. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat digerakkan untuk mengatasi masalah kebutuhan mereka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat; agar masyarakat mau dan mampu untuk mengembangkan dan mendayagunakan berbagai potensi secara optimal, kepada mereka perlu diberikan bimbingan, dan bantuan stimulant.

### C. Penggunaan Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif, dengan pokok bahasan proses pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat melalui pendekatan kredit berskala mikro dalam mensejahterakan keluarga yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro(Lkilometer) Baitul Mal Wa'tamil

(BMT). Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, berdasarkan adanya program yang masih melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui kelompok swadaya masyarakat dan telah mendapatkan pembinaan melalui pemberian kredit pedesaan berskala mikro. Lokasi penelitian di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. *Key informant* ditentukan secara purposif dengan pertimbangan seseorang yang terlibat langsung, mengetahui, peduli dan penerima manfaat program pemberdayaan melalui kredit berskala mikro. Informan dalam penelitian ini adalah Koordinator Kelompok (tiga orang); Masyarakat penerima manfaat sasaran program, 30 orang; Pendamping, satu orang; Pembina dari instansi terkait, empat orang. Pengumpulan data menggunakan empat teknik, wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan telaah dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian: Model Pemberdayaan melalui Kredit Berskala Mikro**

##### **1. Monografi Desa Sukajaya**

Sukajaya merupakan salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sukajaya merupakan desa pertanian yang terdiri dari lahan pertanian untuk sawah dan kebun. Ketinggian lahan kurang lebih 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang dominan adalah tanaman keras dan buah-buahan. Produktivitas lahan relatif baik, karena tanah yang subur dan didukung sistem pengairan yang memadai. Desa ini jika ditempuh dengan kendaraan dari ibukota kecamatan berjarak kurang lebih lima kilometer, dari Ibukota Kabupaten Pandeglang kurang lebih 20 kilometer, dan dari Ibu kota Provinsi Banten kurang lebih 60 kilometer. Batas-batas desa: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Awi Lega dan Desa Padasula, sebelah barat dengan Desa Cikentung dan sebelah Selatan dengan Desa Awi Lega.

Desa Sukajaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.447 jiwa, jumlah kepala keluarga 387. Desa Sukajaya memiliki penduduk miskin 244 orang. Berdasarkan data sekunder yang

ada di Desa Sukajaya, tingkat pendidikan masyarakat rendah, karena dari empat persen masih buta aksara, 62 persen tamatan sekolah dasar, 22 persen tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama, 11 persen tamatan sekolah lanjutan tingkat atas, dan satu persen perguruan tinggi.

Desa Sukajaya dipimpin Kepala Desa (Jaro), dengan perangkat desa lengkap terdiri dari: sekretaris desa dengan lima kepala urusan (Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, Umum dan Kesra). Desa Sukajaya terbagi dalam dua Rukun Dusun (rukun warga/RW) dan delapan rukun tetangga (RT). Institusi yang berperan dalam melakukan pengawasan adalah badan perwakilan desa (BPD) memiliki anggota berjumlah delapan orang. keberadaan BPD ini merupakan representasi masyarakat, anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai komponen, seperti tokoh agama, pemuda, wanita yang dipilih langsung oleh masyarakat. Organisasi kemasyarakatan yang ada antara lain PKK, dipimpin oleh istri kepala desa. Ketua PKK merupakan tim penggerak tingkat desa yang dibantu oleh istri-istri perangkat desa serta kader wanita desa. Kegiatan rutin dilakukan adalah memberi penyuluhan dan bimbingan keluarga, kesehatan lingkungan, posyandu, yang diadakan setiap minggu di Balai Desa; Majelis Ta'lim, merupakan organisasi keagamaan yang paling aktif dalam kegiatan keagamaan di desa Sukajaya; Karang Taruna, yang dalam perjalanannya mengalami pasang surut, secara kelembagaan ada hanya aktifitasnya yang belum berjalan.

Hasil pengamatan di lokasi permukiman Desa Sukajaya terdapat masyarakat miskin 300 kepala keluarga, pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dan pekerjaan yang tidak tetap, seperti pedagang gorengan dan kuli bangunan.

Pekerjaan Penduduk Desa Sukajaya adalah Pedagang, petani, pengusaha home industri dan peternakan. pedagang, sekitar 1,5 persen bermata pencaharian sebagai pedagang warung sembako, tukang gorengan, jualan onderdil sepeda motor, pedagang sayuran dan hasil bumi. Penghasilan mereka kecil rata-rata hanya sekitar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 20.000,- per hari. Matapencaharian penduduk

terbesar di Desa Sukajaya adalah petani padi sawah dan berladang, jumlah petani mencapai 80 persen dari jumlah penduduk; *Home Industri* yang ada di Desa Sukajaya antara lain industri kerajinan tas, pupuk kompos, serta kerajinan anyam-anyaman bambu; Peternakan, yang ada di Desa Sukajaya, kerbau, sapi, domba, kambing, peternakan ayam potong mulai dikembangkan, hasilnya dipasok ke Pandeglang dan Rangkasbitung. Di Desa Sukajaya pernah terdapat koperasi unit desa dengan nama Koperasi

Serba Usaha (KSU), tetapi tidak berjalan, aset yang tersisa adalah sebuah gedung yang cukup representatif tetapi tidak terpelihara. Lembaga keuangan seperti bank belum pernah ada.

## 2. Pemberdayaan masyarakat melalui Kredit Berskala Mikro

Proses pemberdayaan masyarakat melalui kredit berskala mikro yang dilakukan Lkilometer BMT dengan pola pemberdayaan seperti bagan sebagai berikut.

Bagan Pola Pemberdayaan Masyarakat

No	Tahap Persiapan	Tahap Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1	Seleksi	- Bimbingan sosial	- Peningkatan pengetahuan dan wawasan kelompok
2	Pembentukan Kelompok Kube FM	- Bimbingan keterampilan	- Peningkatan keterampilan melalui Kube
3	Pembentukan Pengurus Kube FM	- Bimbingan manajemen	- Mampu memecahkan masalah yang timbul di kelompok
4	Materi Pemberdayaan	- Pemberian stimulan	- Peningkatan pendapatan keluarga
5	Fasilitator	- Pembinaan dan pendampingan	- Adanya kerjasama dengan PINBUK dan BANK

**Tahap Persiapan Pemberdayaan:** Proses pembentukan kelompok berdasarkan informasi yang diperoleh dari 20 pengurus kelompok di Desa Sukajaya, Kecamatan Cadasari, dimulai pada tahun 2004. Proses terbentuknya kelompok dilakukan melalui tahapan, yakni pendataan; seleksi calon anggota; dan bimbingan sosial dan latihan keterampilan menejemen. Pada tahap bimbingan sosial peserta memilih kelompok yang diminati dan menentukan pengurus kelompok. Mereka mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan jenis usaha yang dikelola dan menentukan kebutuhan dalam kaitan dengan usaha yang mereka pilih. Hasil pertemuan mereka digunakan sebagai dasar usulan untuk memohon bantuan berkaitan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaha. Pelaksanaan latihan yang diberikan adalah keterampilan pengelola lembaga keuangan mikro Baitul Mal Wa'tamwil (BMT), khusus untuk pengelola lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pengurus lembaga (manajer, sekretaris dan aparat Desa Sukajaya). Untuk anggota adalah keterampilan berusaha, diberikan sesuai dengan kelompok usaha yang

mereka tentukan. Tenaga pelatih keterampilan diambil dari pengusaha industri kecil yang ada di wilayah Desa Sukajaya dengan cara praktek di tempat usaha sesuai dengan jenis keterampilan usaha yang diinginkan keluarga binaan sosial (KBS). Waktu latihan empat hari untuk kelompok usaha, sesuai dengan informasi yang diberikan pengurus kelompok usaha, bahwa bimbingan keterampilan yang diberikan sudah mengarah kepada jenis usaha yang akan dikelola oleh masing-masing kelompok.

Sasaran pengkajian sebanyak 20 pengurus kelompok, dengan rincian 10 pengurus kelompok dari Rukun Warga 01 dan 10 pengurus kelompok dari Rukun Warga 02, berdiri akhir tahun 2004 dan mulai beroperasi awal tahun 2005. Pemberdayaan melalui pendekatan Kube sudah berjalan selama tujuh-delapan tahun dan berjalan.

Pembuatan kelompok sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam arti ada struktur organisasi (ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota). Dalam awal perkembangan kelompok tidak mengalami perubahan struktur organisasi, hanya terjadi penambahan

anggota baru. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk struktur dan organisasi baru, penggabungan kelompok dari beberapa kelompok yang dipegang oleh seorang koordinator kelompok, tugasnya mengkoordinasikan kelompok usaha yang tergabung menjadi satu. Koordinator kelompok didampingi seorang pendamping lapangan berasal dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM BMT) dan sekaligus sebagai pembina usaha. Gambaran perkembangan kelompok diamati dari ada tidaknya perubahan kondisi pengelolaan pada tahap awal dan kondisi kelompok tahap akhir.

Pengelolaan usaha tahap awal dilakukan secara kelompok sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok, sedangkan pola pengelolaan usaha dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam pengelolaan usaha semuanya terjadi perubahan yang tadinya dikelola secara kelompok dengan jumlah anggota 10 orang, kemudian bergabung menjadi satu kelompok besar dalam upaya untuk membentuk embrio koperasi yang memiliki anggota 150 orang lebih dan membentuk ikatan kelompok. Kelompok yang memiliki anggota 150 orang juga memiliki organisasi kepengurusan seperti kelompok sebelumnya yang terdiri dari ketua disebut koordinator, sekretaris dan bendahara. Pembinaan bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas perindustrian, perdagangan, pemerintah kecamatan dan pengusaha. Bimbingan sosial keluarga pelaksanaannya oleh pendamping LKM-BMT di bawah naungan Bank Mu'amalat dengan mayoritas sasaran pengusaha kecil anggota Kube yang berhasil, tokoh wanita dan aparat instansi terkait.

Manfaat menjadi anggota dalam program pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya penghasilan, walaupun penghasilan tersebut bervariasi, dikarenakan jenis usaha yang dikelola dan kelancaran pemasaran produksi yang dihasilkan. Selain manfaat ekonomis, juga ada manfaat sosial, yakni meningkatnya kemampuan berorganisasi, bertambah teman, meningkatkan pengetahuan anggota kelompok, dan terpecahkannya masalah yang timbul baik masalah kelompok, keluarga, produksi, dan pemasaran.

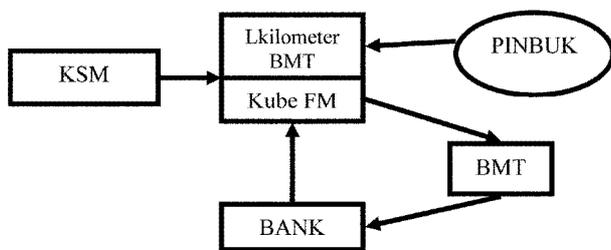
**Pelaksanaan Pemberdayaan:** Secara kuantitas jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) di Desa Sukajaya ada 10 dan 1 Kelompok Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa'tamwil (LKM-BMT). LKM-BMT adalah mitra kerja lembaga pendamping dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM-BMT merupakan kumpulan dari pengurus KSM yang ada di Desa Sukajaya yang tersebar di delapan rukun tetangga ditambah dari anggota Asosiasi KSM, Jaringan pengusaha kecil, dan lembaga pendamping PINBUK. Kegiatan LKM-BMT memberi pelatihan manajemen pengusaha kecil di Desa Sukajaya melalui bimbingan dari PINBUK. Pelatihan pada awalnya hanya diberikan kepada pengurus LKM-BMT Fakir Miskin yang berada di desa Sukajaya, dipromotori oleh BMT yang dimulai tahun 2004.

Peserta pelatihan pada awalnya 16 orang dari dua Kabupaten Pandeglang dan Tangerang, dibagi dalam empat kelompok LKM-BMT (Baitulmal Wa'tamwil) sesuai dengan jumlah Lokasi desa yang ditunjuk. Koordinator empat kelompok tingkat desa di pegang Tim PINBUK BMT yang berkantor di Provinsi Banten. Tugas BMT memberikan pendampingan dengan cara memberi pelatihan dengan materi: mengenal diri dan orang lain, kerja sama dalam suatu kelompok, komunikasi, kepemimpinan, prinsip Kube, AD/ART, penahapan LKM, arti dan manfaat serta jenis-jenis pinjaman, cara mengajukan permohonan dan penilaian kredit, pengawasan dan pengendalian kredit, mekanisme program kredit pedesaan dan hubungan bank dengan Kube (PHBK), kunjungan lapangan, tanya jawab dan penyusunan rencana kerja dari tindak lanjut pelatihan.

Metoda yang dipakai dalam pelatihan adalah pendekatan antara partisipator dengan audiens bukan seperti antara seorang guru dengan murid. Metoda ini disebut pendidikan orang dewasa dan partisipatori, dilakukan agar terjalin hubungan dua arah, peserta bisa aktif menyampaikan pendapat di forum pertemuan atau bermusyawarah untuk mufakat demi tercapainya cita-cita bersama. Proses pendampingan dilakukan selama kurang lebih enam tahun dengan cara terus dibimbing dan diberi bantuan pinjaman modal usaha. Apabila sudah empat tahun dan dinilai sudah mampu, akan dijalin dengan bank sesuai dengan PHBK.

Dalam proses PHBK pada awalnya diberikan lewat pendamping dari PINBUK, kemudian dana diteruskan ke rekening salah satu ketua Kube yang membutuhkan, atau pengurus Kube bisa langsung berhubungan dengan bank tetapi melalui referensi dari pengurus LKM-BMT sebagai lembaga pendamping. Ketika Kube sudah mampu menjalin hubungan dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung (masih melalui LKM-BMT), secara finansial LKM-BMT sudah dapat melepaskan, tetapi pembinaan dan pendampingan masih terus berjalan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, yakni selama enam tahun masa pendampingan. Mekanisme sistem pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kredit berskala mikro seperti bagan berikut.



KSM merupakan forum pengusaha kecil bekerja sama dengan LKM-BMT, membentuk Kube-FM. LKM-BMT bekerja sama dengan PINBUK memberi pelatihan pada pengurus Kube FM. Tugas BMT memberikan pendampingan dan bimbingan, apabila dinilai sudah mampu akan dijalin dengan bank. Kube yang sudah mampu dan menjalin hubungan baik dengan bank, bisa mengajukan pinjaman langsung untuk menambah modal, tetapi harus mendapat persetujuan dari LKM-BMT sebagai pendamping. Desa Sukajaya yang merupakan embrio dari pengembangan program kredit perdesaan di Kabupaten Pandeglang pada mulanya memiliki Kube sebanyak 10 Kube FM. Semua Kube terbentuk akhir tahun 2004, mulai beroperasi awal tahun 2005, bermula dari kelompok yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari LKM-BMT. Jumlah Kube yang masih aktif kepengurusannya 10, semua Kube berada di bawah koordinasi pembinaan PINBUK Baitul Mal Wa'tamwil. Semua Kube yang berada di wilayah Desa Sukajaya anggotanya memiliki

usaha beraneka ragam, yakni usaha warungan (sayur mayur, kelontong, makanan kecil dan pembuatan pupuk kompos), usaha *candak kulak*, peternakan (ayam dan itik), pertanian, kerajinan membuat, menjahit dan pembuatan tas.

Ditinjau dari perkembangan Kube, pada awalnya sebanyak 10 Kube, semua Kube menyebar di delapan wilayah RT Desa Sukajaya. Menurut pengurus koordinator LKM-BMT Desa Sukajaya yang berlokasi di kantor LKM-BMT Baitul Mal Wa'tamwil, jumlah Kube pada saat diadakan pendataan masih tetap berjumlah 10 Kube dan ada penambahan anggota 50 yang dinyatakan sebagai anggota baru. Pada awal pembentukan Kube, juga melalui prosedur yang ditentukan tim dari LKM-BMT (PINBUK), yakni melalui seleksi calon anggota Kube FM, dilanjutkan dengan pembentukan pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) di tingkat RW. Setelah terbentuk kepengurusan, mereka mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Balai Latihan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten yang tempatnya di Rangkas Bitung, untuk pengelolaan BMT dan Kube FM. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari dengan peserta pengurus Kube FM dan pengelola LKM-BMT. Setelah diadakan pelatihan khusus bagi pengurus LKM-BMT di Balai Latihan Sekolah Madrasah Aliah Negeri 2 Serang, yang diikuti oleh tiga pengurus dan satu orang unsur aparat desa yang dijadikan sasaran program Kube FM. Peserta latihan berjumlah 16 orang dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Setelah itu baru pelaksanaan pemberian bantuan modal kredit usaha kecil, yang pengelolaannya dilakukan dengan pembentukan koperasi serba usaha (KSU) yang diberi nama Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa'tamwil (LKM-BMT).

Dilihat dari segi dinamika kelompok dalam pelaksanaan kegiatan usaha berskala kecil, kegiatan usaha dilaksanakan secara perorangan dalam arti anggota Kube FM mendapat pinjaman modal usaha dari koperasi secara pribadi, dikelola secara pribadi melalui seleksi kemampuan anggota dalam berusaha. Pengelolaan Kube FM di Desa Sukajaya dibentuk struktur kepengurusan di tingkat desa yang anggotanya

terdiri dari gabungan Kube FM yang berada di wilayah RW. Kepengurusan ini mengurus semua Kube FM yang ada di desa Sukajaya, bedanya ketua gabungan Kube FM di tingkat desa adalah koordinator Kube FM di tingkat desa atau semua Kube di wilayah RT. Struktur organisasinya sama dengan Kube FM yang ada di seluruh wilayah desa Sukajaya. Gabungan dari beberapa Kube FM tersebut di pegang oleh Pembina Usaha Kelompok (PUK) yang disebut pendamping PINBU.

**Indikator Keberhasilan Pemberdayaan:**

Tujuan program pengentasan kemiskinan secara garis besar ada dua, yakni bersifat ekonomis dan sosial. Tujuan yang bersifat sosial mempunyai pengertian usaha ekonomi produktif bisa dikembangkan bersama-sama oleh setiap anggota dan masih dalam ikatan satu kelompok. Esensi dari pembentukan Kube, bantuan yang bersifat ekonomis dapat merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial di antara anggota kelompok. Perubahan pola pengelolaan Kube FM, dapat diuraikan sebagai berikut. Pengelolaan Kube FM semua mengalami perubahan, yang tadinya dikelola secara kelompok artinya semua pinjaman anggota kelompok harus melalui pengurus kelompok dan tidak bisa diajukan secara perorangan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan atau kemajuan usaha anggota Kube FM, mereka dapat mengajukan pinjaman secara perorangan walaupun masih diharuskan persetujuan dari ketua koordinator pembina kelompok. Pinjaman perorangan diberikan kepada anggota Kube FM yang dianggap sudah maju dan bisa mengajukan pinjaman perorangan ke bank atau pihak Baitul Mal Wa'tamwil (BMT). Pinjaman perorangan tersebut bisa lebih besar dari pinjaman anggota kelompok.

Langkah-langkah pembinaan untuk memberikan motivasi, melatih tenaga kerja pengusaha yang terampil dalam pengelolaan usaha dan pemasaran hasil produksi. Berdasarkan hasil pengkajian ternyata pembinaan Kube FM yang dilakukan oleh BMT berbentuk pengarahan dan kegiatan pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggota Kube FM dan dilaksanakan di Desa Sukajaya, dengan peserta dari perwakilan pengurus Kube

FM yang ditunjuk anggota. Manfaat mengikuti program Kube FM bagi anggota, menurut semua informan, merasakan bertambah penghasilannya. Penghasilan yang mereka peroleh dalam satu bulan sangat bervariasi, karena jenis usaha, modal usaha dan keterampilan anggota untuk mengembangkan usaha berbeda, selain tergantung pada kerajinan kerja dan usaha anggota. Jika dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelum menjadi anggota Kube FM, mereka hanya mendapat uang dari hasil usaha pokok, tetapi setelah mereka dibina BMT minimal dapat membantu meningkatkan penghasilan rumah tangga berkat pinjaman modal. Selain manfaat ekonomi, dilihat dari segi sosial tampak meningkatnya kemampuan berorganisasi dan bertambah teman. Pengetahuan anggota Kube-FM juga meningkat seiring dengan seringnya mengikuti pertemuan untuk membahas persoalan dan hambatan yang timbul dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, baik yang dikelola secara kelompok (koperasi) maupun secara perorangan.

**Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kredit Berskala Mikro:**

Faktor yang mempengaruhi dalam program pemberdayaan adalah adanya semangat, kedisiplinan, keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, yang ditunjukkan dengan mengikuti secara rutin pelatihan yang dilakukan oleh pembina usaha dari LKM-BMT; juga dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang hasil bumi dan kerajinan rumah tangga warganya ke Ibukota Jakarta. Keempat faktor tersebut merupakan pendukung yang mempengaruhi peranan Kube-FM dalam pelaksanaan kegiatan usaha peningkatan ekonomi keluarga yang produktif. Faktor yang mendukung program kredit pedesaan berskala mikro adalah adanya semangat, disiplin dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga dan komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Faktor penghambat dalam pemberdayaan adalah kurangnya program sosialisasi dari lembaga penjamin modal seperti perbankan dan perkreditan.

Kelompok usaha merupakan intervensi melalui proses pemberdayaan masyarakat pe-

nyandang masalah, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, kemampuan berusaha dan keterampilan kerja. Sebelum pembentukan kelompok, diawali dengan pendataan dan seleksi calon keluarga binaan, untuk memenuhi kriteria sebagai keluarga binaan. Mengacu pada pengertian kelompok usaha, proses pembentukan kelompok dan pengelolaannya, apabila dilihat unsur pokok yang terkandung dalam proses pemberdayaan, seperti input (masukan), proses pemberdayaan, penyiapan keluarga binaan, pelaksanaan pemberdayaan, pembentukan kelompok usaha serta cara pemberian bantuan stimulan dan cara pembinaannya, apat dideskripsikan sebagai berikut.

**Input (Masukan)**, pelaksanaan pemberdayaan masih menggunakan pendekatan kelompok, didasarkan pada pertimbangan praktis operasional, untuk memudahkan pelaksanaan pemberdayaan keluarga daripada apabila pembinaan dilakukan secara individu. Kegiatan sosial di dalam suatu kelompok lebih memiliki kekuatan dan jaringan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh keluarga binaan sosial secara perorangan, terutama dalam hal pemasaran hasil produksi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Iver (dalam Soerjono Soekanto, 1986) menyatakan bahwa anggota-anggota dalam suatu kelompok mengalami hubungan timbal balik, saling mempengaruhi serta membuat tumbuh kembangnya kesadaran untuk saling menolong. Cooley (dalam Soerjono Soekanto, 1986) juga menambahkan, bahwa dengan terbentuknya kelompok maka tujuan anggota secara individu juga menjadi tujuan kelompok, apalagi dalam kelompok usaha anggotanya memiliki kesamaan kondisi dan tujuan yang ingin mereka capai. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui kelompok, bantuan stimulan berfungsi sebagai pendorong, perangsang, dan penggiat untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anggotanya.

**Penyiapan keluarga binaan sosial:** Dalam proses penyiapan keluarga binaan sosial yang pertama-tama diperhatikan tiga aspek, yakni kepribadian karena aspek kepribadian erat kaitannya dengan pengembangan sikap mental

dan perilaku, termasuk juga harkat dan martabat dan rasa percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain. Hal ini dapat diketahui dari hasil kajian yang menyatakan kelompok mereka kurang atau tidak bisa berkembang dengan baik karena anggota kelompok mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah, akibatnya anggota kelompok kurang berinisiatif dan sangat tergantung kepada orang lain, cepat putus asa dan memiliki sikap pasrah pada nasib karena memiliki kepribadian yang labil; Aspek keterampilan kerja, salah satu kriteria kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan kerja produktif, sehingga keterampilan kerja merupakan salah satu sasaran utama dalam pemberdayaan keluarga.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pemberian keterampilan kerja sebelum memperoleh bantuan stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan pemberian latihan kerja diberikan oleh aparat daerah setingkat kabupaten dan provinsi yang memiliki dan menjalankan program pemberdayaan di wilayahnya; Aspek pengetahuan, sangat erat kaitannya dengan aspek keterampilan kerja dan kepribadian. Terbatasnya pengetahuan keluarga binaan sosial akibat dari rendahnya pendidikan sehingga dalam kehidupan sehari-hari hanya berorientasi pada masa kini.

**Pelaksanaan pemberdayaan**, dimulai dari sosialisasi program yang dilaksanakan di masyarakat, diikuti seleksi melalui identifikasi calon KBS, kemudian pelaksanaan bimbingan sosial dan pemberian latihan keterampilan, diberikan melalui bimbingan sosial secara kelompok atau melalui pelatihan dan pengarahan di ruangan. Pada tahap bimbingan sosial, peserta diharapkan dapat memilih kelompok yang diminati dan dapat menentukan pengurus kelompok yang dapat membimbing anggotanya dan mengarahkan usaha, menentukan jenis usaha yang dapat dikelola secara kelompok dan perorangan, dan menentukan keperluan yang dapat menunjang kegiatan dalam upaya mencapai tujuan yang mereka tetapkan bersama. Latihan keterampilan yang diberikan adalah usaha, seperti keterampilan manajemen

dan kerajinan rumah tangga. Tenaga pelatih keterampilan dari pihak swasta pengusaha industri kecil yang ada di wilayah masing-masing dengan cara memberikan kesempatan kepada calon keluarga binaan sosial diikutsertakan dalam praktek di tempat usaha sesuai dengan jenis keterampilan usaha yang diinginkan. Lama praktek 15 hari, tetapi tidak semua pembina memberikan waktu selama 15 hari karena pembina hanya memberikan latihan berupa pengarahan yang dilaksanakan oleh petugas dari dinas provinsi dan kabupaten. Pemberian pengarahan menurut informasi dari keluarga binan sosial dilaksanakan tiga hari.

**Pembentukan kelompok usaha**, tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan praktis dan keterbatasan, tetapi memiliki nilai yang lebih mendasar, yakni aktivitas, interaksi dan emosi. Semakin banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelompok binaan sosial semakin beraneka interaksinya yang dapat dilakukan untuk memperoleh kemajuan. Menurut Lewin (dalam Soerjono Soekamto, 1986), yang mendasari pendekatan kelompok adalah bahwa seseorang akan memperoleh manfaat apabila diberi kesempatan berpartisipasi dalam kelompok, pendekatan kelompok akan lebih mudah mengubah pola perilaku individu dalam keluarga daripada secara individual. Sebab, manusia cenderung menaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya. Pendekatan kelompok dalam program pemberdayaan masyarakat miskin lebih tepat apabila lokasi KBS berdekatan, anggota kelompok tidak harus melaksanakan kegiatan secara bersama-sama di satu tempat tertentu atau terpusat; tetapi yang lebih penting adalah untuk menjadi anggota kelompok seseorang harus berada dalam mekanisme kelompok. Karakteristik utama kelompok pada mekanisme kegiatannya, bukan semata-mata pada fisik suatu kelompok

Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, berfungsi sebagai perangsang, pendorong dan penggiat bagi kelompok yang menerima bantuan, agar dikelola dan dapat dikembangkan dengan baik dan benar. Bantuan berupa unsur-unsur alat produksi, peralatan dan keperluan usaha kelompok. Jenis bantuan ditentukan berdasarkan pada beberapa aspek, yakni se-

suai dengan keterampilan anggota kelompok, potensi serta kemudahan pemasaran hasil, anggota kelompok diikutsertakan dalam pemilihan bantuan yang dikelola

Pengelolaan bantuan stimulan dilakukan bersama oleh KBS sebagai anggota kelompok usaha yang memiliki pengertian pada mekanisme kerja, bukan pada pengertian fisik. Tempat pengelolaan bantuan bisa berada di beberapa tempat, tetapi mekanisme kerjanya tetap berada dalam suatu kelompok. Pengertian kelompok lebih mengarah pada mekanisme kerja daripada secara fisik, karena pada mekanisme kerja kelompok tetap terbina dan terpelihara nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan dan senasib sepenanggungan di antara KBS, meskipun tempat kerja dan usaha mereka terpencar di masing-masing rumah KBS. Terpeliharanya nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pertemuan secara berkala bagi anggota kelompok usaha; Untuk mendapatkan areal lokasi yang diharapkan dapat menampung kegiatan secara terpusat akan kesulitan, mengingat kondisi kepemilikan aset produksi KBS sangat kecil. Penempatan lokasi kerja di rumah masing-masing diharapkan dapat mengikutsertakan secara aktif anggota keluarganya dalam membantu pelaksanaan kegiatan usaha dan sekaligus akan memudahkan dalam bimbingan sosial keluarga, sehingga anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap program pemberdayaan.

Modal usaha bagi kelompok diperoleh dari bantuan stimulan dan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BMT melalui LKM-BMT yang telah dimiliki kelompok. Secara prinsip bantuan bersifat stimulan, sebab bantuan hanya sebagai perangsang untuk mendorong dan menggiatkan bagi yang menerimanya agar dapat dikelola dan dikembangkan sehingga KBS dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penentuan jenis bantuan petugas daerah telah menetapkan beberapa kriteria yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian stimulan bagi KBS. Kriteria tersebut adalah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan; bantuan berorientasi pada pasar; dan bantuan disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada. Semua kriteria tersebut dimaksudkan supaya bantuan sesuai dengan

kehendak dan kebutuhan KBS, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota kelompok dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri secara sosial dan ekonomi.

**Pembinaan:** Tenaga pembina struktural statusnya sebagai PNS dari dinas provinsi, kabupaten, kota, dan di tingkat kecamatan. Dari hasil kajian diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah terbatas pada tingkat kecamatan, sedangkan dari dinas provinsi, dan kabupaten/kota terbatas dalam proses pemberdayaan sampai penyerahan bantuan stimulant. Pelaksanaan pembinaan lanjut dilaksanakan oleh pemerintah yang ada di tingkat kecamatan bersama instansi terkait lainnya. Tenaga fungsional adalah yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, berasal dari instansi swasta yang peduli terhadap kemajuan warganya. Dari hasil kajian diperoleh gambaran bahwa tenaga fungsional yang terlibat dalam proses pemberdayaan kebanyakan berasal dari LKM-BMT. Mereka berperan sebagai pendamping lapangan atau sebagai pembina usaha bagi kelompok usaha yang telah terbentuk.

**Model Pemberdayaan yang Dikembangkan:** Hasil kajian, pemberdayaan melalui pendekatan kelompok usaha yang tumbuhnya dari masyarakat, sesuai dengan keinginan warga, pembinaannya pun tidaklah terlalu sulit karena warga masyarakat tahu benar yang harus mereka laksanakan dan memberi bimbingan sosial agar dapat memahami dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan dan sumber yang ada. Program pemberdayaan melalui pendekatan kelompok usaha yang dilaksanakan di kabupaten Pandeglang, Banten, dari hasil kajian dapat diketahui bahwa kedua pendekatan yang dilaksanakan pemerintah dan LSM memiliki hasil yang positif, yakni peningkatan ekonomi KBS karena kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah usaha ekonomi produktif. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi KBS, seperti memiliki tabungan, meningkat pula dampak sosialnya, berupa bertambahnya wawasan dan pergaulan KBS.

## E. Penutup

LKM-BMT maupun Kube-FM pada dasarnya merupakan bentukan intervensi dari luar bertujuan memecahkan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan LKM-BMT dapat menumbuhkan nilai tambah ekonomis, sosial dan budaya. Namun program pemberdayaan sebagai bentukan dari luar apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati dapat menimbulkan masalah ketergantungan. Perlu diperhatikan bagaimana dapat dikonsolidasikan agar setiap anggota dapat berjalan di dalam proses pengambilan keputusan, ikut bertanggung jawab dalam upaya untuk mengembangkan usaha kelompoknya. Dengan bimbingan LKM-BMT terbukti kondisi ekonomi dan penghasilan masyarakat meningkat, dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial baik bagi masyarakat maupun bagi anggota keluarga, karena anggota kelompok merasa bertambah wawasan dan pergaulannya. Keluarga Binaan memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, partisipasi serta keterlibatan semua lapisan masyarakat sangat diharapkan. Peran LSM sudah diakui oleh pemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan LKM-BMT sangat membantu terlaksananya program pembangunan di daerah, contohnya Kabupaten Pandeglang. Peluang dan kesempatan LSM untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat luas mengingat kompleksnya permasalahan dan luas wilayah golongan ekonomi lemah. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi hal itu agar program-program yang dilakukan LSM yang ada di daerah mendapatkan dukungan secara penuh dan dapat dimanfaatkan sebagai pendamping program pengetasan kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Bantuan Sosial, untuk mengimplementasikan program pemberdayaan pada kelompok usaha berskala mikro, dan memanfaatkan serta memberdayakan LSM yang ada di daerah sebagai

pendamping sekaligus ujung tombak pengentasan kemiskinan.

### **Pustaka Acuan**

Departemen Sosial, (1997). *Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta.

\_\_\_\_\_ (2004). *Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama dan LKM*, Jakarta.

\_\_\_\_\_ (2011). *Standar Operasional Prosedur: Lkilometer Kube Sejahtera*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta

Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ginanjar Kartasasmita, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Koentjaraningrat, (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Nurani Soyomukti, (2010), *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Soerjadi, FX. (1982), *Organisasi and Methods*, Jakarta: LAN RI.

Seoryono Soekanto, (1986), *Merperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumodiningrat Gunawan, (2007). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Undang Undang No11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.

Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang *Percepatan Penanggulan Kemiskinan*, Jakarta